

EVALUATION OF THE INTEGRATED TEACHING PROFESSIONAL PRACTICE (PPKT) PROGRAM FOR STUDENTS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT, FITK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Mu'arif SAM

Faculty of Tarbiya and Teacher Training
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: muarif@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the suitability and benefits of the Integrated Teaching Professional Practice (PPKT) Program for Educational Management (EM) students in developing their competencies. The approach used is program evaluation using the Context-Input-Process-Product (CIPP) model which aims to collect accurate and comprehensive information so that it can be used to assist leaders to make further decisions to redesign, improve, or possibly stop the implementation of the program. The results showed that the PPKT program for EM students was not on target and needed to be stopped immediately or replaced with another program whose value was equivalent because: (1) Theoretically contextual, the PPKT was intended for students from study-based study programs so that it was not suitable for EM students; (2) From the Input aspect, students face the constraints of planning, implementing and evaluating learning, the weak competency of supervisors because their educational background is not from an education degree, teaching staff lack competency; (3) Based on the Process aspect, the PPKT implementation is not appropriate expected especially in teaching and research activities because the supervisor and tutor are not able to carry out their duties and functions properly; and (4) From the Product aspect, PPKT has not been able to improve teaching competence, educational research, educational creation and innovation. The acquisition of a high final score does not reflect their competence because more assessment is based on the subjectivity of tutors and tutors. Based on the results of the study, it was suggested that the Head of the EM Department need to reformulate the vision, mission and competency standards of graduates who are more referring to the competence of education staff, encouraging faculty leaders to immediately issue a decision to terminate the PPKT program for EM students and replace it with other programs with the same weight as PPKT.

Keywords: context, input, process, product, PPKT.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesesuaian dan manfaat program Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan di UIN Syarif Hidayatulla bahwa dalam mengembangkan kompetensinya. Pendekatan yang digunakan berupa evaluasi program dengan model *Context-Input-Process-Product* (CIPP) yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi akurat dan menyeluruh agar dapat digunakan dalam membantu pimpinan untuk mengambil keputusan lebih lanjut guna memperbaiki, meningkatkan, atau mungkin menghentikan penyelenggaraan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PPKT bagi mahasiswa Prodi MP tidak tepat sasaran dan perlu segera dihentikan atau diganti dengan program lain yang nilainya setara karena: (1) Secara teoritis kontekstual, PPKT ditujukan untuk mahasiswa dari Prodi yang berbasis bidang studi sehingga tidak sesuai diberlakukan untuk mahasiswa Prodi MP; (2) Dari aspek *input*, mahasiswa menghadapi kendala perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, lemahnya kompetensi dosen pembimbing karena latar belakang pendidikan bukan dari sarjana pendidikan, pamong

pengajaran kurang memiliki bekal kompetensi; (3) Berdasarkan aspek *proses*, pelaksanaan PPKT tidak sesuai yang diharapkan terutama pada kegiatan pengajaran dan penelitian karena dosen pembimbing dan pamong tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar; dan (4) Dari aspek *produk*, PPKT belum mampu meningkatkan kompetensi pengajaran, penelitian kependidikan, kreasi, dan inovasi kependidikan. Perolehan nilai akhir yang tinggi tidak mencerminkan kompetensi mereka karena penilaian lebih banyak didasarkan pada subyektifitas dosen pembimbing dan guru pamong. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan Ketua Prodi MP perlu merumus ulang visi, misi, dan standar kompetensi lulusan yang lebih mengacu kepada kompetensi tenaga kependidikan, mendorong pimpinan fakultas untuk segera mengeluarkan keputusan penghentian program PPKT bagi mahasiswa Prodi MP dan menggantinya dengan program lain yang bobotnya setara dengan PPKT.

Kata kunci: *context, input, process, product, PPKT.*

PENDAHULUAN

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu LPTK memiliki kepentingan yang sangat besar dalam upaya menghasilkan lulusannya menjadi pendidik profesional. Untuk menciptakan lulusan tenaga pendidik yang profesional serta siap berkecimpung di lapangan tidak cukup hanya diberikan teori-teori mengenai metode mengajar, namun calon tenaga pendidik juga harus memperoleh kesempatan menambah pengalaman belajar di madrasah/sekolah.

Upaya yang dilakukan oleh FITK UIN Jakarta untuk menciptakan calon tenaga pendidik profesional adalah dengan memberikan pengalaman teoritis dan praktis. Secara teoritis, di dalam perkuliahan mahasiswa memperoleh wawasan pengelolaan pembelajaran, kode etik (meliputi cara berpakaian layaknya seorang guru), dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Secara praktis mahasiswa dibekali pengalaman lapangan bidang kependidikan agar dapat mempersiapkan diri menjadi guru profesional di bidangnya. Pengalaman lapangan ini merupakan aplikasi teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Pengalaman lapangan ini diberikan dalam sebuah mata kuliah intrakurukuler aplikatif Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) dengan jumlah 6 SKS yang dimanifestasikan dalam bentuk praktik mengajar, pengelolaan kependidikan, pengabdian kependidikan, dan penelitian kependidikan di sekolah/madrasah (FITK UIN Jakarta, 2013: 5).

PPKT wajib diikuti seluruh mahasiswa FITK UIN Jakarta dari jurusan/program studi apapun, tanpa kecuali mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan. Tidak ada perbedaan antara Jurusan Manajemen Pendidikan dengan jurusan-jurusan lain yang memang sudah dipersiapkan menjadi guru pengampu mata pelajaran sehingga terjadi berbagai

permasalahan dalam pelaksanaan tersebut, seperti kurangnya penguasaan materi akibat tidak adanya spesialisasi mata pelajaran tertentu yang dipelajari, ketidaksesuaian mata pelajaran yang diajarkan dengan kompetensi mahasiswa, diragukan kualitas mengajarnya oleh pihak sekolah, kurangnya motivasi dalam mengajar, serta kurangnya pemahaman dalam pengelolaan pembelajaran.

Lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan (Prodi MP) diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta mampu menjadi tenaga pengajar (guru) dengan menguasai mata pelajaran yang belum jelas. Kompetensi yang pertama terkait dengan *core* lulusan manajemen pendidikan, sedangkan kompetensi yang kedua terkait dengan posisi lulusan yang berada di bawah naungan fakultas pendidikan sehingga harus mampu mengajar secara profesional walaupun bidang studi yang diajarkan belum jelas, tidak sebagaimana program studi lain di FITK yang berbasis bidang studi di sekolah/madrasah.

Kurikulum Prodi MP harus mampu mengakomodir kebutuhan lulusan agar menjadi tenaga profesional baik dalam bidang manajemen/administrasi sekaligus profesional sebagai guru bidang studi tertentu. Hal ini berakibat pada gemuknya jumlah sks yang pada gilirannya akan menjadi beban mereka dalam menempuh masa studi. Beban kuliah mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan sebanyak 154 SKS, suatu jumlah sks yang terlalu berat untuk program Strata 1. Bahkan jika konsisten dengan rumusan kompetensi lulusan, seharusnya Prodi MP menawarkan beberapa konsentrasi dengan konsekuensi akan makin bertambah berat beban sks dan satu konsentrasi yang ditawarkan seharusnya adalah guru Bidang Studi Administrasi Perkantoran atau Kewirausahaan yang merupakan 2 mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mahasiswa yang mengambil konsentrasi salah satu dari 2 mata pelajaran inilah yang seharusnya wajib mengikuti PPKT.

Hasil penelitian (*tracer study*) alumni Program Studi Manajemen Pendidikan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sebagian besar alumni bekerja pada lembaga pendidikan formal sebagai guru pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan mulai dari SD/MI hingga SLTA dengan sebagian besar menguasai rumpun pelajaran ilmu sosial, dan sebagian lainnya ada yang mengajar bidang studi PAI, Bahasa Inggris di SD, dan IPA (Mu'arif dan Hasyim Asy'ary, 2011: 69). Ini berarti alumni lebih cenderung memilih bekerja sebagai pendidik (guru) dibanding pekerjaan lainnya. Namun demikian, hasil penelitian tersebut tidak boleh dijadikan sebagai ukuran dan pembenaran jika lulusan Prodi MP boleh menjadi guru dan karenanya wajib mengikuti program PPKT sebagaimana mahasiswa prodi lain yang berbasis

bidang studi. Sesuai regulasi terkait profesi guru memustahilkan lulusan Manajemen Pendidikan bisa menjadi guru. Mereka yang sudah terlanjur menjadi gurupun ternyata harus mengambil kuliah S1 kedua sesuai bidang studi yang diampunya kini agar memperoleh legalitas formal dari pemerintah. Mereka yang sudah terlanjur menjadi guru termasuk ke dalam golongan alumni MP yang “tersesat di jalan yang benar” (diganti dengan: tidak profesional dengan linearitas ilmunya) dan merupakan kecelakaan sejarah (dihapus). Sebagai orang yang berpendidikan tentu tidak ingin terperosok untuk yang kedua kali pada lubang yang sama.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut peneliti menganggap penting untuk mengkaji ulang program PPKT bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan melalui suatu penelitian yang terangkum dalam judul “Evaluasi Program Praktik Profesi Keguruan Terpadu bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.

Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah program PPKT bagi mahasiswa Prodi MP sudah dilaksanakan dengan baik sehingga mahasiswa Prodi MP memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Program

Setiap organisasi/lembaga pasti memiliki program kerja sebagai wujud dari rencana-rencana yang telah disusun. Program kerja juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita/harapan/ tujuan organisasi. Secara umum program dapat diartikan sebagai rencana kerja sebuah organisasi. Menurut Suharsimi (2004: 3), program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang sekelompok orang. Dalam konsepsi ini, terdapat tiga pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu program, yakni: 1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan; 2) terjadi dalam waktu yang relative lama, bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan; dan 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal, melainkan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Program merupakan sebuah sistem dimana sistem itu sendiri merupakan satu kesatuan dari beberapa bagian atau

komponen program yang saling kait mengkait dan bekerja satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan.

Untuk menentukan ketercapaian program dari berbagai aspek, diperlukan suatu kegiatan penilaian yang dikenal dengan istilah evaluasi. Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan istilah penilaian, pengukuran maupun tes. Hopkins dan Stanley mengatakan bahwa “*evaluations is a process of summing up the results of measurements or tests, giving them some meaning based on value judgement*” (Oriondo, 1998: 3). Dalam konsepsi ini, evaluasi dimaknai sebagai penentuan nilai terhadap sesuatu hal, yang meliputi pengumpulan informasi yang digunakan untuk menentukan nilai keberhasilan suatu program, produk, prosedur, tujuan atau manfaat potensi pada desain alternatif pendekatan, untuk mempertahankan pendekatan yang khusus. Evaluasi merupakan suatu proses penentuan nilai dengan mempertimbangkan hasil observasi atau koleksi data yang diperoleh.

Evaluasi program pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara cermat untuk mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan yaitu menghentikan program, merevisi program, melanjutkan program, atau menyebarluaskan program.

Model yang paling umum dalam evaluasi sebuah program, adalah model CIPP. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam (1971, dalam Fernandes, 1984) yang meliputi empat fungsi evaluasi yakni komponen *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product* (CIPP). *Context evaluation* dimaksudkan untuk mengevaluasi konteks misalnya mengevaluasi kurikulum yang berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. *Input evaluation* dimaksudkan untuk mengevaluasi masukan seperti kompetensi guru, sumber-sumber belajar atau sarana pembelajaran, karakteristik sekolah, dan lain-lain. *Process evaluation* dimaksudkan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar, fungsi manajemen, efisiensi administrasi, dan lain-lain. Sedangkan *product evaluation* adalah untuk mengevaluasi keberhasilan *out come* sebuah program.

Program PPKT

Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) adalah mata kuliah intrakurikuler aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar ke dalam program pelatihan untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan dan keterampilan keguruan, pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan, penelitian kependidikan, dan pengabdian kependidikan (FITK: 2015). PPKT merupakan mata kuliah kompetensi umum (MKKU)

dengan bobot 6 SKS dan merupakan bagian integral dari kurikulum program S1 FITK yang wajib diikuti secara penuh dan tuntas oleh setiap mahasiswa jurusan/program studi di lingkungan FITK UIN Jakarta. Karena itu, peserta PPKT adalah mahasiswa program S1 FITK yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang diatur pada buku pedoman PPKT.

Dalam pelaksanaan program PPK, mahasiswa harus mampu menjalankan beberapa aktifitas yang terangkum dalam ruang lingkup kegiatan PPKT. Ruang lingkup kegiatan PPKT terdiri atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas, pengabdian, administrasi, dan penelitian.

PPKT dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari dalam satu minggu selama satu semester atau 4 (empat) bulan di madrasah/sekolah yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Tempat kegiatan PPKT di lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) baik negeri maupun swasta, jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang memenuhi kriteria: berstatus terakreditasi, minimal telah tiga kali meluluskan siswa, minimal memiliki enam rombongan belajar.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Pemilihan model CIPP bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan menyeluruh agar dapat digunakan dalam membantu pimpinan untuk mengambil keputusan lebih lanjut guna memperbaiki, meningkatkan, atau mungkin menghentikan penyelenggaraan Praktik Profesi Keguruan terpadu (PPKT) bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan FITK UIN Jakarta di masa yang akan datang.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif baik dari hasil wawancara, studi dokumen maupun observasi langsung.

Responden/Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa orang, dokumen, dan tempat (Arikunto dan Abdul Jabar, 2009: 88). Sumber data orang terdiri dari Dekan FITK, Ketua Prodi MP FITK, para kepala SMK tempat mahasiswa Prodi MP melaksanakan PPKT, dan mahasiswa Prodi MP. Sumber data dokumen berupa rencana program PPKT yang dibuat mahasiswa, proposal

kegiatan, perangkat pembelajaran, dan laporan PPKT. Sedangkan sumber data tempat adalah sekolah dan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa selama PPKT.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi, tiap-tiap komponen evaluasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen *Context*: profil Prodi MP, profil Mahasiswa MP, latar belakang Program PPKT.
2. Komponen *Input*: bekal kemampuan mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan peserta PPKT, dosen pembimbing, guru pamong pembelajaran, guru pamong administrasi.
3. Komponen *Process*: pembelajaran, kegiatan administrasi, kegiatan kependidikan, kegiatan penelitian, bimbingan dosen, bimbingan pamong, laporan bulanan PPKT.
4. Komponen *Product*: pembelajaran, administrasi, kependidikan, laporan penelitian.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini adalah:

1. Studi Dokumen: dokumen Prodi MP, buku pedoman PPKT, data dosen Prodi MP pembimbing PPKT, data guru pamong pembelajaran PPKT Prodi MP, data guru pamong administrasi PPKT Prodi MP, dokumen penilaian dosen pembimbing PPKT tentang laporan bulanan, data nilai tanggapan dosen pembimbing
2. Kuesioner: mahasiswa Prodi MP, mahasiswa Prodi MP peserta PPKT, persepsi mahasiswa Prodi MP peserta PPKT tentang kompetensi guru pamong administrasi, pengalaman mahasiswa Prodi MP peserta PPKT, penilaian mahasiswa Prodi MP peserta PPKT tentang bimbingan dosen PPKT, penilaian mahasiswa Prodi MP peserta PPKT tentang bimbingan guru pamong PPKT,
3. Wawancara: dokumen penilaian dosen pembimbing PPKT tentang laporan bulanan, data nilai tanggapan dosen pembimbing.

Teknik Analisis Data

Data hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif. Analisis data dikumpulkan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan dan diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstrak teoritis-teoritis terhadap informasi lapangan, mempertimbangkan dan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa factual realistik.

Dengan melakukan konversi dengan hasil temuan observasi dan pendalaman makna, maka diperoleh suatu analisis data yang terus menerus secara simultan di sepanjang proses penelitian (Burhan Bungin, 2003: 94-97). Sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan analisis statistik sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Context* (Konteks)

Pertama, Prodi MP FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara yuridis formil berdiri sejak 27 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/3852008. Jauh sebelum menjadi program studi, embrio MP telah ada sejak 1999 sebagai bagian (konsentrasi) dari Jurusan Kependidikan Islam (KI). Karena istilah konsentrasi tidak dikenal dalam program S1 dan mengingat animo masyarakat terhadap Manajemen Pendidikan semakin tinggi, maka pada tahun 2008 diajukan proposal usulan Perubahan Konsentrasi Manajemen Pendidikan menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan menjadi satu-satunya Prodi baru di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam baik Negeri maupun Swasta ketika itu, bahan hingga saat ini Manajemen Pendidikan dengan gelar kesarjanaan S.Pd. (Sarjana Pendidikan) merupakan nomenklatur yang hanya digunakan oleh UIN Jakarta, sementara PTAI lain menggunakan nomenklatur Manajemen Pendidikan Islam dengan gelar kesarjanaan S.Pd.I. (Sarjana Pendidikan Islam).

Pada tahun 2010 untuk pertama kali Prodi MP mengajukan akreditasi dan memperoleh peringkat C. Pada tahun 2014 diajukan kembali akreditasi dan berhasil memperoleh peringkat A (Dokumen Prodi MP). Status sebagai Sarjana Pendidikan dan peringkat akreditasi Prodi A ternyata belum mampu membuat lulusannya dapat meraih peluang kerja lebih luas dan lebih kompetitif.

Prodi Manajemen Pendidikan menghadapi problematika yang jauh lebih rumit dibanding jurusan Kependidikan Islam (KI). Kalau lulusan KI masih memungkinkan diterima menjadi guru PNS bidang studi Pendidikan Agama Islam, maka hal itu tidak berlaku bagi lulusan Prodi MP.

Pokok persoalan pertama dan utama yang mengakibatkan lulusan Prodi MP mengalami disorientasi pekerjaan adalah pada rumusan Kompetensi Lulusan yang sangat luas dan ambigu (Borang Akreditasi MP, 2012):

1. Menguasai konsep dan teori Manajemen Pendidikan secara utuh.

2. Menguasai wawasan komprehensif dan sistematis berkaitan dengan dunia pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Mampu membuat perencanaan dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Mampu melaksanakan evaluasi, penelitian, dan pengembangan berkaitan dengan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Mampu melakukan pengelolaan dan pengorganisasian bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Mampu bekerja secara profesional pada satuan pendidikan dan pelatihan atau institusi pengembangan sumber daya manusia.
7. Mampu mengelola pusat sumber belajar (perpustakaan) pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah/ perguruan tinggi).
8. Mampu menjadi tenaga pengajar sesuai dengan bidang mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan.

Bahkan secara spesifik jenis pekerjaan yang dapat diisi oleh lulusan Prodi MP berdasarkan rumusan Kompetensi Lulusan adalah sebagai berikut (Borang Akreditasi MP, 2012):

1. Tenaga administratif/manajemen pada instansi pemerintah, swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan serta pengembangan SDM dan pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah/perguruan tinggi).
2. Tenaga perencana program kerja dan pengelola bidang pendidikan di madrasah/sekolah, bidang pelatihan dan pengembangan SDM pada instansi pemerintah maupun swasta.
3. Tenaga peneliti dan pengembangan dalam bidang pendidikan, pelatihan serta pengembangan SDM baik di instansi pemerintah, swasta maupun dunia industri.
4. Tenaga pengelola perpustakaan pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah/ Perguruan tinggi).
5. Pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan serta instansi pengembangan SDM terutama bagi mereka (lulusan) yang sebelumnya sudah mempunyai pengalaman.
6. Tenaga pengajar pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Rumusan kompetensi yang mengandung muatan multi dimensi tentu akan menyebabkan kesulitan dalam menyusun kurikulum sebagai alat untuk mencapai kompetensi. Kurikulum Prodi MP harus mampu mengakomodir kebutuhan lulusan agar

menjadi tenaga profesional baik dalam bidang manajemen/administrasi sekaligus sebagai guru profesional pada bidang studi tertentu. Hal ini akan berakibat pada gemuknya jumlah SKS yang harus diperoleh mahasiswa yang pada gilirannya akan menjadi beban mereka dalam menempuh masa studi. Kenyatannya, memang beban kuliah mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan sebanyak 154 SKS, suatu jumlah SKS yang terlalu berat untuk program Strata Satu (S1). Bahkan jika konsisten dengan rumusan kompetensi lulusan, seharusnya Prodi MP menawarkan beberapa konsentrasi dengan konsekuensi akan makin bertambah berat beban sks yang harus ditanggung mahasiswa, dan salah satu konsentrasi yang ditawarkan seharusnya adalah Konsentrasi Guru Bidang Studi Administrasi Perkantoran atau Kewirausahaan yang merupakan 2 mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mahasiswa yang mengambil konsentrasi salah satu dari 2 mata pelajaran inilah yang seharusnya wajib mengikuti PPKT. Namun jika hal tersebut diwujudkan, maka akan semakin menambah ketidakjelasan arah dan kompetensi sesungguhnya lulusan Prodi Manajemen Pendidikan.

Berdasarkan analisis konteks pada aspek profil Prodi dapat disimpulkan bahwa Prodi MP belum mampu merumuskan profil lulusan yang spesifik sesuai dengan visi dan misi Prodi bahkan cakupan profil yang ada terlalu luas dan beragam sehingga sulit dicapai.

Selanjutnya pada bagian *kedua*, hasil telisik latar belakang pendidikan⁷² mahasiswa Prodi MP angkatan 2012 melalui angket diketahui bahwa 38,89% (28 orang) berasal dari Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta, 29,17 (21 orang) berasal dari SMA, dan sisanya yaitu 31,94% (23) orang berasal dari SMK baik negeri maupun swasta. Umumnya (72,5%) menyatakan bahwa mereka memutuskan mengambil Prodi MP berdasarkan pilihan sendiri, sedangkan 27.5% menyatakan karena terpaksa. Yang agak mengejutkan adalah ketika ditanya tentang alternatif pilihan prodi, 85% menyatakan bahwa Manajemen Pendidikan merupakan Prodi Pilihan kedua dan hanya sebagian kecil (10%) yang menyatakan pilihan pertama. Data ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa Prodi MP berasal dari pendidikan umum dan walaupun kuliah di Prodi MP itu pilihan sendiri namun bukan merupakan pilihan pertama. Pilihan tersebut didasarkan pada cita-cita untuk menjadi Manajer Pendidikan/Kepala Sekolah (57.5%), Pengawas Pendidikan (25%), guru (17.5), dan tidak satupun di antara mereka yang ingin menjadi Pegawai Tata Usaha. Yang lebih mengejutkan adalah ketika ditanya tentang tetap eksisnya kuliah, 70% menyatakan bahwa mereka tetap bertahan kuliah di Prodi ini karena merasa tidak ada pilihan lain, 25%

menyatakan sudah terlanjur, 7,5% menyatakan sesuai dengan cita-cita dan hanya 5% yang merasa yakin bahwa prospek MP di masa depan sangat bagus.

Tampilan data menyiratkan makna adanya salah persepsi tentang produk lulusan MP. Mereka berpersepsi dan berharap setelah lulus nanti akan menjadi kepala sekolah, pengawas pendidikan, atau minimal guru. Ketiga profesi ini bukanlah produk Prodi MP sebab untuk menjadi guru kualifikasi S1 bidang studi yang relevan serta kompetensi yang memadai yang mencakup aspek kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial tidak diperoleh mahasiswa Prodi MP baik melalui kurikulum yang ditawarkan maupun program lain. Memang benar ada beberapa mata kuliah pembelajaran, tetapi hal tersebut tidak memadai untuk mencetak mereka menjadi guru.

Untuk menjadi kepala sekolah juga tidak mungkin, sebab persyaratan kualifikasi kepala sekolah harus berasal dari guru. Demikian halnya untuk menjadi pengawas pendidikan, persyaratan utamanya adalah harus menjadi guru atau kepala sekolah terlebih dahulu, apalagi status pengawas pendidikan haruslah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada umumnya (70%) mahasiswa memahami akan visi dan misi Prodi dan hanya sebagian (30%) yang menyatakan kurang memahami, bahkan mereka juga peduli dan meyakini (70%) keunggulan visi misi tersebut. Tetapi menurut pengetahuan mereka lulusan Prodi MP akan bekerja sebagai Kepala sekolah (80%) karena beranggapan bahwa menjadi manajer pendidikan berarti menjadi kepala sekolah atau pengawas pendidikan (15%) atau paling tidak menjadi guru (5%). Nampaknya salah persepsi tentang Prodi MP disebabkan karena belum jelasnya gambaran tentang karir lulusan dan upaya-upaya yang dilakukan pihak prodi maupun fakultas belum optimal. Hal tersebut terungkap dari jawaban mereka ketika ditanya tentang sosialisasi kompetensi prodi melalui berbagai forum, sebagian besar (67,5%) mahasiswa menyatakan bahwa pimpinan fakultas/prodi memberikan gambaran yang kurang jelas tentang karir lulusan, hanya sebagian mahasiswa (32,25%) yang menyatakan pimpinan memberikan gambaran yang jelas tentang karir setelah lulus, akibatnya ada sebagian mahasiswa (17,5%) yang ingin keluar dari Prodi MP tetapi merasa tidak memiliki alternatif lain sehingga terpaksa tetap bertahan dalam kebimbangan hingga lulus. Bahkan sebagian kecil (7,5%) merasa terjebak dalam dunia kuliah yang tidak jelas mau jadi apa.

Walaupun tidak seluruh mahasiswa memiliki gambaran yang jelas tentang karir setelah lulus nanti, namun dalam proses perkuliahan umumnya mengikuti dengan sungguh-sungguh, hal itu karena mereka menganggap bahwa sebagian besar proses perkuliahan yang

dilaksanakan dosen menyenangkan karena sebagian besar dosen menguasai materi perkuliahan. Mereka juga (70%) merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak Prodi walaupun masih terdapat 30% yang menyatakan kurang menyenangkan. Ini berarti pimpinan prodi perlu meningkatkan layanan dengan cara lebih sering berada di kantor prodi agar setiap mahasiswa dapat terlayani dengan baik.

Terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan setiap semester, sebagian besar dari mereka (90%) menyatakan bahwa mata-mata kuliah tersebut memadai untuk mencapai visi dan misi serta profil lulusan Prodi MP. Demikian pula dengan komponen mata kuliah pembelajaran, sebagian besar (62.5%) menyatakan mata kuliah pembelajaran yang mencakup perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran memadai untuk memahami pembelajaran. Namun ketika dimintakan pandangan tentang mata kuliah Pengajaran Mikro, 42.5% menyatakan mata kuliah tersebut memadai untuk bekal PPKT pada aspek praktik mengajar, sedangkan 57,5% menganggap mata kuliah tersebut kurang memadai untuk bekal PPKT pada aspek praktik mengajar. Hal ini berarti bahwa sebenarnya sebagian besar mahasiswa belum siap melaksanakan PPKT, terutama pada aspek praktik mengajar. Ini kondisi yang sangat wajar karena mereka bingung dihadapkan pada kondisi yang sulit akan mengajar apa nanti ketika PPKT karena selama 7 semester mengikuti proses perkuliahan belum pernah secara spesifik dikenalkan pada salah satu mata pelajaran yang dipelajari siswa di sekolah. Walaupun mereka belajar Administrasi/Manajemen Perkantoran, maka konten yang dipelajari pada mata kuliah tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan mata pelajaran Administrasi Perkantoran di SMK. Bahkan jika ditelusuri harapan mereka setelah lulus, memang hanya 27.5% yang berharap dapat bekerja menjadi guru dan harapan inipun agak sulit terwujud karena untuk menjadi guru harus lulusan program studi yang linier dengan salah satu mata pelajaran yang terdapat di sekolah/madrasah sedangkan berdasarkan kajian kurikulum selama ini tidak terdapat nomenklatur mata pelajaran/bidang studi Manajemen/Manajemen Pendidikan baik di SMA/SMK maupun di Madrasah Aliyah. Manajemen hanya merupakan salah satu pokok bahasan pada suatu mata pelajaran tertentu.

Ketidaksiapan mahasiswa mengikuti PPKT juga berbanding lurus dengan persepsi mereka tentang PPKT. Hanya sebagian kecil (15%) yang menyatakan bahwa mahasiswa Prodi MP wajib melaksanakan PPKT. Sementara 10% menyatakan tidak perlu melaksanakan PPKT, 17.5% berharap diperbolehkan menggantinya dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN), 30% berharap dapat melaksanakan praktikum khusus bidang Manajemen Pendidikan yang

setara bobot SKS-nya dengan PPKT, tetapi ada juga (27.5%) yang bersedia melaksanakan PPKT namun tidak wajib melaksanakan praktik mengajar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bersedia melaksanakan PPKT, walaupun terpaksa harus melaksanakannya karena program wajib maka untuk praktik mengajar lebih baik diganti dengan keterampilan lain disebabkan mereka meyakini bahwa bekal untuk praktik mengajar tidak memadai sehingga khawatir akan mengalami kegagalan dalam melaksanakan aspek tersebut. Bahkan bukan hanya praktik mengajar, ternyata penelitianpun dianggap sebagai satu kendala lain dalam program PPKT. Hal itu dapat diketahui dari jawaban mreka ketika ditanya tentang komponen PPKT yang menjadi kendala, sebagian besar (60%) menyatakan kendala utamanya adalah praktik mengajar dan penelitian, sebagian (25%) menyatakan praktik mengajar, dan hanya sebagian kecil (15%) yang menyatakan tdaik ada kendala satupun. Berdasarkan kondisi-kondisi itulah sehingga sebagian besar (60%) menyatakan belum siap, sebagian lagi (25%) menyatakan tidak siap untuk mengikuti program PPKT, sedangkan yang menyatakan siap melaksanakan hanya 25%. Bahkan seandainya program tersebut tidak diberlakukan untuk mahasiswa Prodi MP, sebagian besar (85%) menyatakan setuju.

Paparan data tentang pandangan mahasiswa terkait program PPKT mengindikasikan bahwa sebenarnya mereka menolak program tersebut, namun karena ini adalah kegiatan wajib dan sementara sampai hari ini tidak ada kegiatan pengganti yang setara, maka dengan terpaksa mereka mengikutinya.

Selanjutnya, pada aspek *ketiga*, berdasarkan konsep dasar dan latar belakang lahirnya PPKT maka jelas tergambar bahwa tujuan PPKT adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Tujuan tersebut merupakan perwujudan dari upaya membantu mahasiswa FITK sebagai calon guru agar memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, sedangkan realitasnya tidak semua mahasiswa FITK adalah calon guru.

Jika merujuk pada rumusan kompetensi utama lulusan Prodi Manajemen Pendidikan, maka mahasiswa Prodi MP seharusnya tidak perlu mengikuti program PPKT karena program ini sesungguhnya hanya dikhususkan bagi calon guru sedangkan Prodi MP tidak mempersiapkan lulusannya menjadi calon guru, tetapi calon tenaga administrasi (tenaga kependidikan).

ANALISIS INPUT

Mahasiswa Peserta PPKT

Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti PPKT adalah mereka yang secara akademik telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 SKS dan lulus kelompok mata kuliah kependidikan serta lulus mata kuliah *Mikro Teaching*.

Secara akademik formal memang mahasiswa Prodi MP yang akan mengikuti program PPKT sudah memenuhi persyaratan tersebut namun secara perlakuan akademik pengalaman mereka jauh berbeda dengan mahasiswa dari Prodi berbasis bidang studi. Pada Prodi berbasis bidang studi, mahasiswa dilatih menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran serta membimbing siswa bukan hanya melalui mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, Strategi Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran, tetapi juga melalui berbagai mata kuliah lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Sedangkan mahasiswa Prodi MP hanya memperoleh tiga mata kuliah pembelajaran, sementara tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan PPKT harus sama dengan mahasiswa dari Prodi berbasis bidang studi.

Untuk lebih meyakinkan hasil analisis input pada aspek kemampuan awal mahasiswa, diuraikan data hasil penyebaran angket terkait dengan pernyataan tentang penguasaan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai inti kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, pernyataan tentang kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan teknis administrasi, dan kemampuan menyusun kegiatan kependidikan.

Kompetensi utama yang perlu dimiliki dalam menyusun RPP adalah kemampuan menjabarkan setiap Kompetensi Dasar (KD) ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Ketika hal tersebut ditanyakan, seluruh mahasiswa (100%) mengakui bahwa mereka belum mampu menguasai hal itu. Demikian halnya dalam menyusun materi pembelajaran, umumnya mereka mengakui masih mengalami kesulitan (72.5%) karena pemahaman tentang kurikulum 2013 masih sangat terbatas. Dalam hal menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik, mereka juga mengaku masih belum memahaminya secara baik. Mereka juga mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian otentik yang mengharuskan seluruh kompetensi disusun instrumen penilaiannya.

Penelusuran dokumen hasil belajar mahasiswa Prodi MP pada salah satu mata kuliah pembelajaran yaitu Perencanaan Pembelajaran menunjukkan bahwa dari 33 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, hanya 5 orang mahasiswa yang memperoleh nilai A, 1 orang

memperoleh nilai 83 (delapan puluh tiga) dan 4 orang memperoleh nilai 80 (delapan puluh) pada ujian akhir semester (Daftar Nilai Perencanaan Pembelajaran kelas VIA Prodi Manajemen Pendidikan, 10 Desember 2015), sedangkan 28 mahasiswa lainnya (sebagian besar) memperoleh nilai berkisar 70-79. Ini menunjukkan bahwa secara akademik bekal mereka untuk mempraktikkan aspek pembelajaran pada program PPKT berada pada kategori sedang.

Pengalaman sebagai dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di Prodi MP, kelemahan mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran merata pada setiap aspek. Hal ini disebabkan karena sebelum mengambil mata kuliah Perencanaan Pembelajaran mereka tidak dilatih menganalisis kurikulum melalui beberapa mata kuliah, sedangkan latihan menyusun perangkat pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran waktunya sangat terbatas.

Demikian halnya dalam praktik mengajar yang dilaksanakan melalui mata kuliah Pengajaran Mikro. Keterbatasan waktu dan pemahaman terkait mata pelajaran di sekolah, rendahnya kemampuan menampilkan pembelajaran, membutuhkan bantuan dan bimbingan intensif dari dosen pembimbing dan guru pamong Pembelajaran ketika mereka harus melaksanakan praktik mengajar.

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing adalah dosen tetap FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berlatar belakang kependidikan (sarjana kependidikan) dan/atau telah mengikuti pelatihan kependidikan dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya III/b. Dosen Pembimbing merupakan pihak penentu kelulusan mahasiswa praktikan dalam Program PPKT.

Adapun persyaratan menjadi dosen pembimbing adalah: memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2, berpangkat fungsional sebagai lektor, diutamakan yang memiliki sertifikat praktik sebagai dosen pembimbing, memahami pelaksanaan PPKT yang kegiatan mengajar (merencanakan dan melaksanakan pembelajaran), kegiatan pengelolaan pendidikan dan penyusunan laporan, bersedia melaksanakan tugas membimbing mahasiswa praktikan secara utuh dan meluangkan waktu membimbing mahasiswa sesuai dengan jurusan/program studinya (Buku Pedoman Praktik Profesi Keguruan Terpadu, 2015).

Persyaratan tersebut tidak seluruhnya dipenuhi oleh dosen pembimbing. Terkadang karena keterbatasan dosen pembimbing maka belum berpangkat fungsional lektorpun terpaksa ditunjuk sebagai pembimbing, bahkan berdasarkan studi dokumen ditemukan dua orang dosen pembimbing yang berstatus bukan sebagai dosen tetap Prodi Manajemen

Pendidikan. Persyaratan lain pun ternyata sulit dipenuhi. Misalnya, bagaimana mungkin pembimbing mampu melaksanakan bimbingan secara utuh kalau jumlah kunjungan dibatasi maksimal 4 kali hadir di sekolah/madrasah tempat praktik. Jika masa praktik hanya 4 bulan, maka pembimbing hanya hadir satu kali dalam satu bulan, sementara pemberian bimbingan di luar tempat praktik (seperti di kampus) tidak dianggap sebagai bimbingan. Akibatnya sudah dapat diduga bahwa pembimbing hanya datang ke lokasi sebanyak 4 kali sesuai yang dipersyaratkan, bahkan pada beberapa kasus ada dosen pembimbing yang sama sekali tidak datang ke lokasi dan sama sekali tidak melakukan komunikasi apalagi bimbingan di luar lokasi tempat praktik.

Khusus pada Prodi MP sendiri dari tahun ke tahun pelaksanaan PPKT masih diwarnai dengan mangkirnya dosen pembimbing untuk melakukan kunjungan dan bimbingan mahasiswa praktikan di lokasi praktik. Kalau ke lokasi praktik saja tidak bersedia, apalagi bertemu di kampus untuk melakukan bimbingan. Sibuk, mahasiswa bimbingan tidak pernah menghubungi/berkomunikasi, tidak tahu kalau ditunjuk sebagai dosen pembimbing, biaya transport, dan honor yang kecil, seolah menjadi beberapa alasan klasik dan klise yang sering terdengar tiap kali program ini dijalankan. Di sisi lain, berdasarkan analisis dokumen ternyata dosen Prodi MP yang selama ini ditunjuk menjadi pembimbing tidak seluruhnya memahami pelaksanaan PPKT terutama pada aspek praktik mengajar. Dari 13 dosen tetap yang menjadi pembimbing PPKT, hanya 3 orang dosen yang berlatar belakang S1 bidang pendidikan dan memiliki pemahaman serta kompetensi pembelajaran, sedangkan 10 orang dosen lainnya tidak berlatar belakang S1 maupun S2 bidang pendidikan (Dokumen Borang Akreditasi Prodi MP 2014). Ini menunjukkan bahwa dari aspek kompetensi, sebagian besar dosen Prodi MP tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Jika dosen-dosen Prodi MP selama ini tidak memiliki kompetensi dan pengalaman pembelajaran maka program PPKT tentu tidak akan berjalan optimal dan tidak akan memberi dampak positif bagi mahasiswa Prodi MP guna meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang menjadi penciri kompetensi guru.

Guru Pamong Pengajaran

Guru Pamong pengajaran adalah tenaga pendidik di madrasah/sekolah tempat kegiatan PPKT yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 keguruan yang linear dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tempat mahasiswa melakukan praktik. Guru Pamong pengajaran diharapkan mampu membimbing mahasiswa praktikan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Mengingat posisinya sebagai guru di madrasah/sekolah

tempat praktik, maka Gguru pamong sangat memungkinkan melaksanakan bimbingan lebih intensif dibanding dosen pembimbing.

Selain berkualifikasi S1, sesungguhnya syarat menjadi guru pamong jauh lebih banyak dan lebih berat dibanding syarat menjadi dosen pembimbing.

Jika konsisten dengan persyaratan yang begitu banyak tersebut, seharusnya pihak penyelenggara PPKT menyampaikan persyaratan yang dimaksud dan melakukan verifikasi terhadap dokumen calon pamong PPKT yang dari pihak sekolah/madrasah calon tempat pelaksanaan PPKT. Namun selama ini nampaknya pihak penyelenggara tidak melakukan verifikasi kualifikasi dan kompetensi calon pamong dan hanya menerima data nama calon pamong yang tanpa disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Memperoleh guru pamong pengajaran yang sesuai dengan karakter Prodi Manajemen Pendidikan bukan hal mudah, sebab dari awal sebelum mahasiswa melaksanakan program PPKT sudah banyak muncul persoalan, terutama dalam hal praktik mengajar yang menjadi muatan utama PPKT dan memiliki bobot nilai 40% dari keseluruhan bobot nilai PPKT.

Mahasiswa Prodi MP juga mengalami kesulitan dalam memperoleh tempat praktik yang terbaik mengingat mereka hanya diperbolehkan melaksanakan praktik di SMK. Di wilayah Tangerang Selatan, Depok, dan sebagian Bogor jumlah SMK Negeri dapat dihitung dengan jari, yang paling banyak adalah SMK swasta dan kebanyakan kualifikasi guru-guru di SMK swasta bukan berasal dari kependidikan sehingga dikhawatirkan kurang mampu membimbing mahasiswa melaksanakan praktik mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogik.

Pamong Administrasi

Di dalam *Buku Pedoman PPKT* tidak ditemukan persyaratan khusus yang tercantum terkait dengan pamong administrasi, yang ada hanya tugas Kepala Urusan Ketatausahaan Madrasah/Sekolah padahal Pamong Administrasi-lah yang nanti membimbing dan menilai praktikan terkait aspek kompetensi kepribadian dengan bobot 10% dan kegiatan pengabdian kependidikan dengan bobot 20% yang terdiri atas dua kegiatan yaitu kegiatan kependidikan dan kegiatan administrasi pendidikan, suatu bobot yang cukup besar dan menentukan nilai serta kelulusan setiap praktikan PPKT.

Berdasar Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, terdapat tuntutan kualifikasi dan kompetensi khusus, bahkan di SMA/MA/SMK tenaga administrasi sekolah disyaratkan berkualifikasi Sarjana S1 dan memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

Jika untuk mengerjakan tugas rutin saja perlu persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana telah disebutkan, untuk menjadi pembimbing mahasiswa yang notabene adalah calon sarjana seharusnya kualifikasi dan kompetensi tersebut menjadi persyaratan umum di samping persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh pihak fakultas sesuai kebutuhan dan demi tercapainya program PPKT secara optimal. Sama sekali bukan hal yang baik menyerahkan sepenuhnya kegiatan apa saja dan penilaian terserah saja tentang kegiatan administrasi dan kependidikan kepada pihak yang tidak diketahui kualifikasi dan kompetensinya.

Tidak adanya persyaratan kualifikasi dan kompetensi pamong administrasi juga dapat ditafsirkan bahwa kegiatan administrasi dan kependidikan hanya sebagai pelengkap yang tidak terlalu penting sehingga tidak perlu persyaratan macam-macam bagi pamongnya, lain halnya dengan kegiatan pengajaran. Jika hal ini benar, maka sesungguhnya mahasiswa Prodi MP tidak cocok mengikuti kegiatan PPKT dan harus diganti dengan program lain yang setara yang lebih mengedepankan aspek manajemen pendidikan, bukan aspek pengajaran.

ANALISIS PROSES

Praktik Mengajar

Langkah awal sebelum praktikan benar-benar melaksanakan pembelajaran pada suatu kelas adalah dengan melakukan observasi kelas yang dimaksudkan agar praktikan memperoleh gambaran tentang kondisi riil kelas dan mengenali siswa yang akan diajar sehingga diharapkan praktikan tidak merubah habit kelas secara frontal. Hal ini penting dilakukan mengingat mereka adalah pendatang baru yang kehadirannya di dalam kelas boleh jadi disukai atau tidak disukai siswa.

Menurut pengakuan responden, tidak semua guru pamong pengajaran memberi kesempatan praktikan untuk melakukan observasi praktik mengajar. Umumnya (62,5%) pada pekan pertama berada di sekolah, mereka bertemu guru pamong pengajaran untuk membuat janji dan langsung menggantikan guru untuk mengajar penuh pada beberapa kelas. Demikian halnya dengan kegiatan asistensi yang bertujuan agar guru pamong bisa memperbaiki kelas jika praktikan masih salah dalam mengajar dan dapat memberikan upaya perbaikan serta bimbingan sehingga kesalahan dapat diperbaiki dan diminimalisir.

Guru pamong beranggapan bahwa mahasiswa sudah dibekali berbagai keterampilan mengajar sehingga “diyakini mereka pasti sudah bisa mengajar” (Wawancara dengan 3 guru Pamong Pengajaran). Hampir setiap melakukan kunjungan kelas jarang sekali bisa duduk

bareng dengan guru pamong menikmati “pertunjukan” pembelajaran mahasiswa dan memberikan konfirmasi setelah mereka tampil mengajar. Kalaupun mereka hadir di sekolah, praktikan tetap dibiarkan menghadapi rimba kelas sendirian tanpa bantuan yang berarti dari pemilik kelas yang sesungguhnya.

Banyak juga guru pamong pembelajaran yang membiarkan praktikan melaksanakan pembelajaran tanpa terlebih dahulu menyusun RPP karena selama ini faktanya gurupun banyak yang tidak menyusun RPP, hanya mendownload lewat internet.

Dalam hal menyusun instrumen penilaian pembelajaran, dari studi dokumen RPP yang dibuat praktikan, ternyata praktikan hanya menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi pengetahuan sedangkan instrumen penilaian untuk mengukur kompetensi sikap spiritual, sikap sosial dan keterampilan hampir tidak disusun oleh para praktikan. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada guru pamong, mereka mengatakan bahwa di sekolah tersebut tidak ada keharusan membuat penilaian sikap dan keterampilan.

Setiap kegiatan pengajaran yang dilaksanakan praktikan harus didokumentasikan secara baik dan dilaporkan kepada Dosen pembimbing secara periodik (setiap bulan) setelah terlebih dahulu diperiksa dan ditanda tangani oleh guru pamong pengajaran dan kepala sekolah. Namun kenyataannya tidak semua praktikan menyusun laporan pengajaran bulanan dan menyerahkannya kepada dosen pembimbing. Dari 40 responden yang dikonfirmasi tentang hal tersebut, hanya 12,5% yang menyatakan selalu menyusun laporan bidang pengajaran setiap bulan, 17,5% menyatakan sering menyusun laporan, sisanya yaitu 70% menyatakan jarang atau bahkan tidak pernah menyusun laporan bulanan. Kebanyakan dari mereka yang tidak menyusun laporan bulanan beralasan karena dosen pembimbing tidak pernah menagih laporan tersebut. Bahkan berdasarkan informasi dari praktikan yang selalu membuat laporan bulanan, ternyata ada dosen pembimbing yang tidak bersedia diberi laporan bulanan, cukup dibuat secara keseluruhan pada akhir pelaksanaan PPKT.

Pengelolaan Kependidikan

Kegiatan ini dilaksanakan di luar kegiatan pembelajaran dan dimaksudkan agar praktikan mampu mengelola pendidikan sesuai dengan kapasitas guru sebagai administrator dan pembimbing sehingga jika kelak ia menjadi guru maka bukan hanya pandai mengajar tetapi juga memahami dan terampil menjalankan fungsi administratif dan bimbingan siswa.

Untuk mengerjakan tugas teknis administrasi kelas (seperti merekap kehadiran siswa, mengisi buku nilai, mengisi buku induk, dan lain-lain) hampir tidak ada kendala. Demikian pula keterlibatan praktikan dalam teknis berbagai bidang administrasi sekolah lainnya

(seperti administrasi kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, perpustakaan, dan lain-lain) nampaknya tidak ada kendala yang berarti. Namun dalam hal inisiasi, perencanaan, dan pengorganisasian serta kerjasama nampaknya masih belum optimal.

Pengabdian Kependidikan

Pengabdian kependidikan diimplementasikan dalam bentuk pengembangan kompetensi sosial yakni pengembangan kemampuan praktikan sebagai bagian dari masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, para guru, tenaga kependidikan, orangtua/wali siswa, dan masyarakat sekitar.

Keterlibatan praktikan dalam kegiatan pengabdian kependidikan dapat dilakukan dengan merencanakan, melaksanakan, dan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti: Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, olahraga, seni, bimbingan kelompok belajar, pengelolaan koperasi, kegiatan keagamaan, dan upacara peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Praktikan juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan bimbingan konseling, mengembangkan dan mendayagunakan media/sumber belajar, merancang dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, melakukan pembinaan kerohanian dan ahlak, serta mewujudkan lingkungan pendidikan yang Islami (Wawancara dengan 3 guru Pamong Pengajaran). Sama halnya dengan kegiatan pengelolaan pendidikan, dalam kegiatan pengabdian kependidikan praktikan juga lebih banyak melaksanakan hal-hal rutin serta teknis yang telah ada sebelumnya sehingga tidak nampak adanya hal-hal baru baik dalam program, metode atau minimal perbaikan dan pengembangan.

Penelitian Kependidikan

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian lapangan bagi para praktikan. Melalui kegiatan mahasiswa diharapkan mampu mengelola kegiatan penelitian lapangan tentang pendidikan, mengungkapkan fenomena/permasalahan pendidikan dan kependidikan di madrasah/sekolah, dan diharapkan memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan berbagai penelitian berikutnya sebagai sikap kreatif dan inovatif terhadap pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan.

Walaupun bekal akademik terkait dengan penelitian kependidikan sudah diberikan melalui beberapa mata kuliah namun sebagai pemula yang belum pernah melakukan penelitian, mereka butuh pendampingan dan tidak boleh dilepas begitu saja. Di sinilah pentingnya kehadiran dosen pembimbing bagi praktikan dalam proses penelitian. Pada buku pedoman PPKT secara spesifik tidak ditemukan tugas pembimbing, hanya secara umum

pembimbing bertugas memberikan bimbingan dan arahan berkenaan dengan kegiatan penelitian kependidikan serta memberikan penilaian terhadap hasil penelitian praktikan.

Kegiatan penelitian seharusnya sudah dimulai sejak mahasiswa melakukan observasi pendahuluan pada pekan pertama mereka berada di lokasi/setelah serah terima peserta PPKT. Sesuai aturan program, pekan pertama seharusnya dimanfaatkan mahasiswa praktikan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah baik dari aspek pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah, relasi dan komunikasi antar guru, kegiatan administrasi, kegiatan ekstra kurikuler, kinerja guru, dan lain-lain. permasalahan yang sudah teridentifikasi kemudian didalami lebih lanjut pada pekan-pekan berikutnya di bulan pertama praktikum berada di sekolah/madrasah, kemudian dikonsultasikan dengan dosen Pembimbing sehingga pada bulan pertama mahasiswa sudah dapat memilih permasalahan untuk diangkat sebagai tema penelitian.

Dalam menyusun penelitian, keberadaan Dosen Pembimbing tidak dimanfaatkan oleh praktikan. Umumnya mereka jarang bahkan tidak pernah melakukan konsultasi dengan pembimbing secara intensif baik pada bulan pertama maupun bulan selanjutnya. Kalaupun ada konsultasi, masalah yang dibahas hanya sekitar judul penelitian sedangkan substansi lain dari penelitian tidak pernah dibahas bersama.

Bimbingan Dosen Pembimbing

Jika dicermati secara seksama, nampak bahwa tugas dosen pembimbing begitu banyak dan beragam sehingga dibutuhkan keahlian dan waktu yang lama untuk dapat melaksanakan bimbingan secara optimal. Karena bimbingan hanya boleh dilaksanakan di tempat praktik dan di luar itu tidak dianggap sebagai kegiatan bimbingan, maka dia harus lebih sering berada di lokasi PPKT agar mahasiswa bimbingannya secara kontinyu memperoleh bimbingan dan pembinaan serta penilaian yang otentik.

Dalam pelaksanaannya, maksimal kewajiban hadir di lokasi hanya 4 kali dan ini berarti setiap bulan hanya wajib hadir 1 kali. Jika dosen pembimbing hadir melakukan serah terima mahasiswa praktikan dan hadir ketika acara penutupan, maka praktis kegiatan bimbingan tinggal 2 kali pada setiap tempat praktik. Jika dalam satu sekolah terdapat 3 mahasiswa bimbingannya dan ketiganya akan melaksanakan ujian mengajar pada waktu dan hari yang berbeda, sedangkan peraturan mewajibkan dosen pembimbing hadir dalam ujian tersebut, maka ada 1 orang praktikan yang tidak dihadiri pembimbing ketika ujian pembelajaran dan kesempatan untuk melaksanakan bimbingan tiap bulan sudah tidak ada lagi. Jadi secara

matematis apabila kewajiban hadir hanya 4 kali selama program berangsur maka sangat mustahil pembimbing dapat melaksanakan kegiatan bimbingan secara optimal.

Masalah lain yang dijadikan justifikasi (pembenaran) bagi dosen pembimbing tidak melakukan kunjungan ke sekolah adalah rendahnya honor PPKT dan kecilnya biaya transport yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, jauhnya lokasi tempat PPKT dari domisili dosen pembimbing, tidak adanya komunikasi dari mahasiswa bimbingan, dan kepercayaan penuh kepada guru pamong. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakhadiran dosen pembimbing menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi sebagian praktikan. Di antara mereka bahkan ada yang merasa senang ketika dosen pembimbing tidak hadir melaksanakan penilaian ujian mengajar, karena dengan begitu mereka tidak perlu repot-repot menyusun RPP. Dan yang lebih menguntungkan lagi karena mereka merasa terhindar dari kondisi yang menakutkan. Bagi sebagian mereka, kehadiran dosen pembimbing di dalam kelas dan pada saat ujian praktik mengajar merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bahkan bisa membuyarkan konsentrasi dan hafalan mengajar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ada lagi yang menganggap kehadiran dosen pembimbing hanya merepotkan karena pasti akan ditanya berbagai macam persoalan yang belum tentu jawaban dan alasannya berkenan di hati dosen pembimbing. Di samping itu praktikan juga merasa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyediakan jamuan selama kehadiran dosen pembimbing.

Bimbingan Guru Pamong

Pada pekan pertama dan kedua yang seharusnya praktikan diberi kesempatan melakukan observasi kelas, tetapi kenyataannya banyak pamong pengajaran yang langsung menyuruh guru mengajar utuh sebagaimana layaknya guru senior sehingga banyak praktikan yang mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. Praktik mengajar terbimbing yang seharusnya tetap dalam pengawasan dan bimbingan guru pamong serta dosen pembimbing dengan menggunakan pendekatan supervisi klinis dan minimal dilaksanakan selama 4 kali justru dilepas begitu saja oleh guru pamong untuk menghadapi belantara kelas tanpa pengawasan dan bimbingan yang intensif.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, atas dasar apa pamong pembelajaran melepas bebas praktikan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pekan pertama dan pekan-pekan selanjutnya bahkan hingga ujian mengajarpun pamong pengajaran ada yang tidak hadir di dalam kelas? Mereka berdalih bahwa mahasiswa yang akan melaksanakan praktik tentu sudah lulus mata kuliah pembelajaran dan bekal mereka dianggap sudah sangat memadai.

Seorang guru pemula yang sudah lulus program Sarjana S1 Pendidikan dengan gelar S.Pd. saja masih belum boleh langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di sekolah, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi agar benar-benar profesional, apalagi bagi praktikan yang statusnya masih mahasiswa semester 7/8 yang belum tentu lulus menjadi sarjana.

Bimbingan Pamong Administrasi

Pamong administrasi membantu, membimbing dan membina praktikan dalam kegiatan pengelolaan kependidikan dan pengabdian kependidikan.. Dua kegiatan ini menjadi tugas tambahan bagi praktikan dengan harapan sebagai para calon guru mereka bukan hanya terampil mengajar tetapi juga mampu menjalankan tugas tambahan. Pamong administrasi juga memberikan penilaian secara kualitatif terhadap kegiatan yang dilaksanakan praktikan bidang administrasi dan pengabdian kependidikan, dan memberikan penilaian secara kualitatif terhadap kompetensi kepribadian praktikan. Biasanya yang ditunjuk sebagai pamong administrasi adalah kepala Tata usaha atau staf tata usaha.

Menjadi hal yang lumrah jika kemudian praktikan hanya diposisikan sebagai staf administrasi yang terjebak pada rutinitas administratif dengan tugas hanya berkisar pada teknis catat mencatat, mengetik, dan mengarsipkan dokumen, sedangkan harapan untuk menginisiasi dan mengkreasi kegiatan administrasi tidak pernah terwujud hingga program PPKT berakhir.

Penyusunan Laporan Bulanan

Sesuai dengan pedoman PPKT, setiap praktikan wajib menyusun dan menyerahkan laporan bulanan atas berbagai aktifitas yang telah dilakukan (praktik mengajar, kegiatan kependidikan, kegiatan pengabdian kependidikan, dan kegiatan penelitian) selama satu bulan dan rencana kegiatan pada bulan berikutnya kepada dosen pembimbing.

Namun demikian, banyak praktikan yang tidak menyusun dan menyerahkan laporan bulanan kepada dosen pembimbing, sebaliknya banyak juga dosen pembimbing yang tidak menuntut adanya laporan bulanan sehingga nampaknya pada kasus ini ada “simbiosis mutualisme” (mahasiswa diuntungkan dengan tidak membuat laporan bulanan dan dosenpun diuntungkan dengan tidak dibebani membaca dan menilainya).

Monev

Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang seharusnya dilaksanakan minimal 2 kali oleh tim pimpinan fakultas dengan kunjungan lapangan dan wawancara, belum terlaksana secara merata.

Analisis *Product*

Produk PPKT berupa kemampuan akhir praktikan menyusun RPP, kemampuan akhir melaksanakan pembelajaran, kompetensi kepribadian, laporan penelitian, dan laporan akhir PPKT. Berkenaan dengan hal tersebut maka analisis yang dapat penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Rentang penilaian 1 – 5 yang tanpa disertai penjelasan dan kriteria secara rinci akan menyulitkan bagi penilai untuk memberikan skor yang tepat sehingga pihak penilai hanya dapat mengira-ngira dan menduga-duga berdasarkan “*common sense*-nya”.
2. Penggunaan format nilai akhir PPKT yang hanya berisi nilai akhir ujian tiap-tiap komponen PPKT tanpa disertai indikator-indikator yang rinci memang membantu dan memudahkan dosen dalam menulis dan menyerahkan nilai PPKT bahkan meringankan beban penyelenggara dalam mengelola nilai, namun di sisi lain hal tersebut memberi celah kepada dosen pembimbing untuk mengambil jalan pintas memberikan nilai tanpa harus membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai tumpukan dokumen tiap individu praktikan.

Bukti jalan pintas dan subyektifitas penilaian dapat ditelisik dari dokumen daftar nilai PPKT yang dihimpun penyelenggara program, yaitu Laboratorium FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Dari 42 peserta PPKT Prodi Manajemen Pendidikan, hanya 3 orang yang memperoleh nilai B dengan skor terendah 75, sedangkan 39 lainnya memperoleh nilai A dengan skor terendah 80 dan skor tertinggi 95. Dari dokumen tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata yang mereka peroleh adalah 82,12 (A), suatu nilai rata-rata yang tergolong tinggi. Aspek kegiatan PPKT yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah kompetensi kepribadian (87,11), pengabdian kependidikan (82,23), dan laporan pelaksanaan PPKT. Sedangkan kegiatan pengajaran dan penelitian kependidikan masing-masing memperoleh nilai rata-rata 80,73 (A) dan 78,41 (B).

Kebanyakan dosen pembimbing memberikan nilai tinggi bukan didasarkan pada kemampuan praktikan dalam melaksanakan berbagai kegiatan PPKT, tetapi lebih banyak didasarkan kepada pertimbangan lamanya pelaksanaan program tersebut yang tentu tiap mahasiswa sudah mengorbankan tenaga, pikiran, waktu serta biaya yang tidak sedikit.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa program PPKT bagi mahasiswa Prodi MP tidak tepat sasaran dan perlu segera dihentikan atau diganti dengan program lain yang nilainya setara karena:

1. Secara teoritis kontekstual, PPKT ditujukan untuk mahasiswa dari Prodi yang berbasis bidang studi sehingga tidak sesuai diberlakukan untuk mahasiswa Prodi MP.
2. Ditinjau dari aspek input, mahasiswa Prodi MP peserta PPKT menghadapi kendala perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, kompetensi dosen Prodi MP untuk menjadi pembimbing PPKT lemah, guru pamong pengajaran juga kurang memiliki bekal kompetensi.
3. Dianalisis dari aspek proses, pelaksanaan PPKT tidak sesuai yang diharapkan terutama pada kegiatan pengajaran dan penelitian karena dosen pembimbing dan pamong tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.
4. Ditelisik dari aspek produk, PPKT belum mampu meningkatkan kompetensi pengajaran, penelitian kependidikan, kreasi dan inovasi kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal/Penelitian

Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

FITK UIN Jakarta, *Buku Panduan Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) 2013*.

SAM, M dan Asy'ary, H. (2011). *Laporan Penelitian Kolektif Tracer Study Alumni Program Studi Manajemen Pendidikan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Sumber dari Buku

Arikunto, S. dan Jabar, C.S.A. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suprihatiningrum, J. (2013). *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Tayibnapis, F.Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.